

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini diantaranya:

1. Shalehah, Siti Raudah, dan Gusti Muhammad Hidayatullah (2025) berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara” diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 Tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana program pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan efektif dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat pelaksana program dan masyarakat penerima manfaat. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan perempuan belum sepenuhnya efektif. Secara umum program telah memiliki mekanisme kerja yang baik dan sasaran kegiatan yang jelas. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta keterbatasan

anggaran. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program masih tergolong rendah. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi Campbell J.P. (1970) yang dikutip dalam Mutiarin & Zaenudin (2014:96–97), dengan lima indikator utama: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, perbandingan input–output (efisiensi), dan pencapaian tujuan menyeluruh. Kelima indikator tersebut relevan dengan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers (1985) yang menekankan pentingnya pencapaian tujuan, efisiensi sumber daya, serta kemampuan organisasi merespons kebutuhan lingkungan. Dengan demikian, penelitian Shalehah dan Hidayatullah (2025) memberikan dasar empiris yang kuat bagi penelitian ini karena memiliki kesamaan konteks wilayah dan topik, yaitu efektivitas program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan landasan teorinya. Penelitian Shalehah dan Hidayatullah (2025) menilai efektivitas secara umum di tingkat dinas, sedangkan penelitian ini berfokus pada Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, dengan menggunakan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers (1985) sebagai dasar analisis utama.

2. Hafni Zahara, Mawardati, dan Cut Rozzana Sari (2025) berjudul “Kajian Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Aceh Utara” dimuat dalam Jurnal Agrifo Vol. 10 No. 1 April 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana Program

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap kepala bidang hortikultura, penyuluh pendamping, ketua kelompok tani, serta anggota kelompok wanita tani yang aktif dalam program P2L. Analisis dilakukan dengan pendekatan literatur dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program P2L di Kabupaten Aceh Utara telah berjalan dengan efektif, dengan skor efektivitas mencapai 94,79 %. Empat variabel utama—sosialisasi program, keberhasilan pelatihan, pendampingan, dan pencapaian tujuan program—masing-masing memperoleh kategori “efektif” dengan rentang skor 91–94 %. Program ini berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemanfaatan lahan pekarangan, menumbuhkan kemandirian pangan rumah tangga, serta memperkuat solidaritas sosial ekonomi di tingkat kelompok wanita tani (KWT). Namun demikian, penelitian ini juga mencatat beberapa kendala, seperti penurunan motivasi anggota kelompok pada tahun-tahun berikutnya, keterlambatan penyaluran bantuan, dan keterbatasan sarana pendukung yang berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Penulis menekankan perlunya pendampingan intensif, penyuluhan berkelanjutan, serta penguatan peran perempuan dalam pengelolaan pekarangan untuk menjaga keberlanjutan hasil program. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas program pemberdayaan perempuan dapat diukur dari pencapaian tujuan, efisiensi pelaksanaan, serta responsivitas program terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga aspek ini sejalan dengan

indikator efektivitas program menurut Richard M. Steers (1985) maupun Evalina dkk. (2020), yang menilai efektivitas melalui pencapaian tujuan organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian, penelitian Hafni Zahara dkk. (2025) memberikan dasar empiris yang kuat bagi penelitian ini, terutama dalam konteks efektivitas program pemberdayaan perempuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga. Perbedaan terletak pada objek dan fokus kajian: penelitian Hafni Zahara dkk. menitikberatkan pada ketahanan pangan melalui program P2L, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas Program PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dalam aspek sosial-ekonomi masyarakat Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, dengan menggunakan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers (1985) sebagai dasar analisis utama. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai Efektivitas. Namun demikian, penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa keunggulan dan pembeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Shalehah dan Hidayatullah (2025) menilai efektivitas program pemberdayaan perempuan secara umum di tingkat dinas, sedangkan penelitian ini fokus pada Program PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) di tingkat desa, sehingga hasilnya lebih mendalam dan spesifik.
2. Penelitian Hafni Zahara dkk. (2025) menitik beratkan pada efektivitas program ketahanan pangan (P2L), sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas program sosial-ekonomi berbasis pemberdayaan perempuan kepala keluarga.

3. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas Program PEKKA di tingkat desa dengan menggunakan sepuluh indikator efektivitas menurut Richard M. Steers.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru secara teoritis maupun empiris dalam menilai efektivitas program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Secara umum, pengertian efektivitas ini merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau juga pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, serta juga waktu, sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Hery (2018:3), "Efektivitas mencerminkan pencapaian sasaran yaitu melakukan segala sesuatu dengan benar yang membantu organisasi mencapai sasarannya".

Hani Handoko (Ismail Nawawi Uha, 2015:93), Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar sumbangan output terhadap tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Sinambela (2016:278), "Efektivitas adalah keberhasilan yang diperoleh atas suatu program yang ditetapkan".

Sudiro (2018:200), "Efektivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya dalam arti kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai".

Pasalong (2017:4), "Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan".

Handyaningrat dalam buku Eko Indra Heri (2020:184), menjelaskan bahwa efektivitas dapat dimaknai sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Devas dalam buku Chairil Anwar Pohan (2021:191) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah yang harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya. Apabila dikaitkan dengan penerimaan pendapatan maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar berhasil mencapai target penerimaan pendapatan yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Robbins dalam buku Chairil Anwar Pohan (2021:187) mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok, dan struktur dalam organisasi.

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo dalam buku Ratna Eka Sari (2020:20) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dengan sasaran yang hendak dicapai itulah maka tujuan sebelumnya yang telah ditentukan akan mencapai suatu keberhasilan sesuai apa yang menjadi keinginan. Efektivitas terjadi pada suatu aspek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan dan untuk setiap program yang efisien. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas diartikan sesuatu yang dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Jika kita ingin melakukan suatu hal, maka kita harus melakukannya secara efektif supaya hasil yang dilakukan tidak mengecewakan.

b. Pendekatan Efektivitas

Pada teori Budiani dalam (Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3) adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

1. Pendekatan Sasaran (Goals Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sarana yang hendak dicapai. Pendekatan sarana dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sarana yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan program

dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

2. Pendekatan Sumber (Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan nya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena Lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3. Pendekatan Proses (Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan dengan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian efektivitas dalam menilai efektivitas program, Fathor Rasyid (2022) menjelaskan

berbagai pendekatan evaluasi (Daniel Setiawan, 2022:22-23), sebagai berikut :

1. Pendekatan eksperimental (experimental approach), pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision focused approach). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dan menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user oriented approach). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (pre-existing condition), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi di mana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis Data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.
5. Pendekatan yang responsive (the responsive approach). pendekatan responsive menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stakeholder program). Evaluator menghindari satu jawaban untuk satu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

c. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu organisasi tidaklah mudah, artinya dapat dipelajari dari sudut yang berbeda tergantung pada orang yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, kondisi itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Steers dalam buku Daniel setiawan et al (2022:22) ada 5 (lima) kriteria indikator dalam pengukuran efektivitas, kriteria tersebut yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan mendapatkan nilai lebih,
5. Pencarian sumber daya

Menurut Duncan dalam Chairil Anwar Pohan (2021:188) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan. Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, agar pencapaian tujuan akhir makin terjamin, diperlukan penahapan, baik dalam arti penahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun penahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri atas beberapa faktor, yaitu kurun waktu, dasar hukum, dan sasaran yang merupakan target konkret.
2. Integrasi. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi.
3. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam maupun luar organisasi. Untuk itu digunakan tolak ukur

proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri atas beberapa faktor: i) peningkatan kemampuan; ii) sarana dan prasarana.

Menurut James L. Gibson dalam Ilham (2022:8-9) bahwa terdapat 6 (Enam) kriteria untuk mengukur efektivitas yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai
2. Kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Adanya perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat, serta
6. Adanya sarana dan prasarana dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Adapun Sebagai bahan pertimbangan rujukan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa teori di antaranya :

Evalina (2020) menjelaskan bahwa efektivitas program dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Pencapaian tujuan, yaitu tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
2. Ketepatan sasaran, yaitu kesesuaian antara program dengan kelompok yang menjadi target penerima manfaat.
3. Pemanfaatan sumber daya, yaitu kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara optimal.
4. Hasil atau dampak program, yaitu perubahan atau manfaat yang dirasakan setelah program dilaksanakan.

Untuk mengukur bagaimana efektifitas program penelitian ini menggunakan teori menurut teori Ricard M. Steers dalam Buku Efektivitas Organisasi adalah sebagai berikut:

Steers mengemukakan tiga indikator utama efektivitas organisasi:

1. Pencapaian Tujuan (Goal Achievement) Mengukur sejauh mana tujuan organisasi tercapai sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan.
2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Resource Efficiency) Menilai kemampuan organisasi menggunakan waktu, tenaga, biaya, dan fasilitas secara tepat guna untuk menghasilkan output yang maksimal.
3. Responsivitas (Responsiveness) Menilai sejauh mana organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan eksternal.

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Richard M. Strees dalam buku Monica Feronica (2021:139) mengemukakan

beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas seperti:

1. Karakteristik Organisasi. Karakteristik organisasi mempengaruhi efektivitas kerja, karena karakteristik organisasi ini menggambarkan struktur yang harus dilalui oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Karakteristik dari organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur organisasi adalah cara menempatkan manusia sebagai bagian dari pada suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola-pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran.
2. Karakteristik Lingkungan. Karakteristik lingkungan ini secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi seperti peralatan, perlengkapan, hubungan diantara pegawai dan kondisi kerja. Ciri lingkungan ini selalu mengalami perubahan artinya memiliki sifat ketidakpastian karena selalu terjadi proses dinamisasi.
3. Karakteristik Pekerja. Pada kenyataannya para anggota merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku mereka lah yang dalam jangka tertentu akan memperlancar merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan.
4. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen. Praktek manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang dalam mengkondisikan semua hal ada didalam organisasi. Kebijakan dan praktek manajemen ini harus memperhatikan juga unsur manusia sebagai individu yang memiliki

perbedaan bukan hanya mementingkan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya dan menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang bijaksana, adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan inovasi organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan perkembangannya lingkungan maka peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit.

2. Program

a. Pengertian Program

Program merupakan bagian integral dari kebijakan public yang berfungsi sebagai bentuk operasional dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya bersifat normatif dan strategis, sedangkan program merupakan instrumen pelaksanaan yang bersifat teknis dan aplikatif di lapangan. Dengan kata lain, program menjadi jembatan antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat.

Menurut Winarno (2016), program merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan publik yang dirancang secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui kegiatan nyata. Program disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan, kemudian diterjemahkan ke dalam serangkaian aktivitas yang memiliki sasaran, waktu, sumber daya, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas. Melalui program, pemerintah atau lembaga pelaksana dapat mengimplementasikan kebijakan secara terstruktur dan terarah.

Selanjutnya, Dunn (2018) menjelaskan bahwa program merupakan tindakan atau rangkaian aktivitas yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program menjadi sarana penting untuk

memastikan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sementara itu, menurut Nugroho (2017), program publik adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk memecahkan masalah sosial melalui kegiatan terstruktur yang melibatkan sumber daya manusia, anggaran, serta sistem pengelolaan yang jelas. Program harus memiliki kejelasan tujuan, sasaran yang tepat, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa program merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis sebagai bentuk implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara terencana dan terarah.

Dalam konteks penelitian ini, Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan bentuk implementasi kebijakan publik dalam bidang pemberdayaan perempuan. Program ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti simpan pinjam, pelatihan keterampilan, Jurnalis Warga PEKKA (JWP), serta sekolah ekonomi berkeadilan. Oleh karena itu, keberadaan program tidak hanya dipahami sebagai kegiatan rutin, tetapi sebagai upaya sistematis untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Desa Kayakah.

b. Komponen Program

Program sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan.

Kejelasan dan keterpaduan antar komponen tersebut sangat menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut William N. Dunn (2018), program publik merupakan seperangkat tindakan yang terstruktur dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam kerangka tersebut, program harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang teridentifikasi, serta mekanisme evaluasi yang dapat mengukur capaian kebijakan.

Sejalan dengan itu, Riant Nugroho (2017) menyatakan bahwa program publik adalah instrumen operasional kebijakan yang disusun secara sistematis dengan melibatkan sumber daya, pengorganisasian kegiatan, serta indikator kinerja yang terukur. Program yang baik tidak hanya berorientasi pada kegiatan, tetapi juga pada hasil (output) dan dampak (outcome) yang ingin dicapai.

Berdasarkan pandangan tersebut, komponen utama program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Program (Goals and Objectives) merupakan arah atau kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program. Menurut Budi Winarno (2016), tujuan program harus dirumuskan secara jelas agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan serta menjadi dasar dalam proses evaluasi kebijakan. Tujuan yang spesifik dan terukur akan memudahkan penilaian terhadap tingkat keberhasilan program.

2. Sasaran Program (Target Group) adalah kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat program. Dunn (2018) menekankan bahwa ketepatan identifikasi kelompok sasaran sangat menentukan efektivitas kebijakan, karena kebijakan publik pada dasarnya dirancang untuk menyelesaikan masalah kelompok tertentu dalam masyarakat.
3. Kegiatan Program (Activities) merupakan bentuk operasional dari program yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Nugroho (2017) menjelaskan bahwa kegiatan harus disusun secara sistematis dan logis agar mampu menghasilkan output yang mendukung tercapainya tujuan program.
4. Sumber Daya (Resources) mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan. Winarno (2016) menyatakan bahwa ketersediaan dan kualitas sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi program, karena tanpa dukungan sumber daya yang memadai, tujuan kebijakan sulit diwujudkan.
5. Indikator Keberhasilan. merupakan alat ukur untuk menilai capaian program. Dunn (2018) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan memerlukan indikator yang jelas agar dapat diketahui sejauh mana program menghasilkan perubahan sesuai tujuan yang ditetapkan.
6. Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan bagian integral dari siklus program. Nugroho (2017) menegaskan bahwa program publik harus disertai dengan sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komponen program meliputi tujuan, sasaran, kegiatan, sumber daya, indikator keberhasilan, serta monitoring dan evaluasi yang saling terintegrasi. Keterpaduan antar komponen tersebut menentukan efektivitas program dalam mencapai tujuan kebijakan.

3. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

a. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar memiliki kemampuan, kemandirian, dan kekuatan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada bantuan material, tetapi juga pada proses penyadaran, peningkatan keterampilan, serta penguatan posisi tawar dalam struktur sosial.

Menurut Mardikanto (2018), pemberdayaan adalah proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap sumber daya. Pemberdayaan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui pendampingan dan pengorganisasian kelompok.

Sementara itu, Naila Kabeer (2016) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan mencakup tiga dimensi utama, yaitu:

- a. Resources (Sumber Daya) – akses terhadap modal, pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi.

- b. Agency (Kemampuan Bertindak) – kemampuan mengambil keputusan dan menentukan pilihan hidup.
- c. Achievements (Pencapaian) – hasil nyata berupa perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai keberhasilan suatu program pemberdayaan perempuan.

b. Perspektif Gender dan Kerentanan Perempuan Kepala Keluarga

Perempuan kepala keluarga merupakan kelompok yang rentan secara ekonomi dan sosial. Mereka tidak hanya memikul tanggung jawab domestik, tetapi juga tanggung jawab ekonomi keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan kepala keluarga mengalami keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, modal usaha, serta perlindungan sosial.

Fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep feminization of poverty, yaitu kondisi di mana kemiskinan lebih banyak dialami perempuan akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan kepala keluarga menjadi penting sebagai upaya mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam perspektif pembangunan, pendekatan Gender and Development (GAD) menekankan pentingnya perubahan struktur sosial dan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pemberdayaan perempuan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan.

c. Konsep Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

Secara kelembagaan, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan organisasi yang berfokus pada penguatan kapasitas perempuan kepala keluarga melalui pendekatan berbasis komunitas. Program PEKKA menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan yang aktif, bukan sekadar penerima bantuan.

Program PEKKA dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pembentukan kelompok PEKKA
2. Simpan pinjam berbasis kelompok
3. Pelatihan keterampilan usaha
4. Pendidikan kritis dan advokasi hak perempuan
5. Pendampingan berkelanjutan

Pendekatan berbasis kelompok ini memperkuat solidaritas, meningkatkan partisipasi sosial, serta membangun kepercayaan diri perempuan kepala keluarga.

d. Tujuan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Program PEKKA dirancang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan perempuan kepala keluarga melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas.

Secara kelembagaan, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menetapkan bahwa tujuan utama program PEKKA adalah memperkuat kapasitas perempuan kepala keluarga agar mampu:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui akses terhadap modal, pelatihan, dan pengembangan usaha.

2. Memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum dan hak-hak perempuan.
4. Memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas.
5. Membangun solidaritas dan organisasi perempuan berbasis kelompok.

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa program PEKKA tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial, politik, dan psikologis perempuan kepala keluarga.

Dengan demikian, dalam penelitian ini efektivitas program PEKKA di Desa Kayakah akan dianalisis berdasarkan sejauh mana tujuan-tujuan tersebut tercapai dalam pelaksanaan program.

e. Dimensi Pemberdayaan dalam Program PEKKA

Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui program PEKKA dapat dianalisis melalui beberapa dimensi berikut:

1. Dimensi Ekonomi

Peningkatan pendapatan, akses modal usaha, serta kemampuan mengelola usaha.

2. Dimensi Sosial

Peningkatan partisipasi dalam kegiatan kelompok dan kegiatan masyarakat.

3. Dimensi Politik

Keterlibatan dalam musyawarah desa atau pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

4. Dimensi Psikologis

Meningkatnya rasa percaya diri, keberanian menyampaikan pendapat, serta kesadaran akan hak-haknya.

Dimensi-dimensi tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana program PEKKA mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan perempuan kepala keluarga.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran alur berpikir yang mendasari penelitian mengenai Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Program pemberdayaan PEKKA bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup perempuan kepala keluarga melalui pelatihan keterampilan, dukungan modal, serta penguatan kelembagaan kelompok. Namun, dalam praktiknya ditemukan berbagai permasalahan, antara lain menurunnya antusiasme anggota dalam pelatihan, keterbatasan strategi pemasaran, serta rendahnya partisipasi anggota dalam program menabung.

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai dasar berpikir dalam memahami hubungan antara teori, konsep, dan realitas di lapangan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori efektivitas program menurut Richard M. Steers yang menekankan bahwa efektivitas dapat dilihat dari kemampuan program dalam

mencapai tujuan, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Teori ini kemudian diperkuat oleh penelitian mutakhir (Shalehah & Hidayatullah, 2025; Hafni Zahra dkk., 2025) yang menegaskan bahwa efektivitas program publik dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk menganalisis efektivitas program tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas Richard M. Steers dan diperkuat (Shalehah & Hidayatullah, 2025; Hafni Zahra dkk., 2025) yang menekankan tiga indikator, yaitu:

1. Pencapaian tujuan – sejauh mana program mencapai sasaran yang telah ditetapkan
2. Efisiensi penggunaan sumber daya – sejauh mana sumber daya (waktu, tenaga, dana) digunakan secara tepat dan bermanfaat.
3. Responsivitas – sejauh mana program mampu merespon kebutuhan anggota serta kondisi lingkungan sekitar.

Dengan menggunakan indikator tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program PEKKA di Desa Kayakah?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas program tersebut?

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas program, sekaligus rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Desa Kayakah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

